

DAFTAR BACAAN

Buku :

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Harahap, M. Yahya , *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Ilmar, Aminudin, *Hak Menguasai negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta.

Nasarudin, M Irsan, *Aspek- aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, - cet V, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

R.Ibrahim, *Prospek BUMN Perserodan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Sugiharto, et.al, *BUMN Perserodi Indonesia Isu, Kebijakan dan Strategi*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2005.

Tim Dosen Pengajar Hukum Perseroan, *Buku Ajar Perseroan*, Surabaya, 2011

Internet :

Akibat Hukum Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, www.bppk.kemenkeu.go.id

Ardan Adhi Chandra, www.m.detik.com, Asal Usul Pembentukan *Holding* BUMN, diakses pada 21 september 2018

Deden, Pemerintah akan Utamakan Sektor Migas dalam Rencana *Holding* BUMN, www.job-like.com

Idris Rusadi Putra, Pemerintah disarankan kaji ulang *Holding* BUMN PerseroMigas, ini alasannya, www.merdeka.com

M. Agus Yozami, *Holding* BUMNMigas Dinilai Ciptakan Masalah Baru, www.hukumonline.com

M. Dani Pratama Huzaini, Menakar Problem Konstitusionalitas *Holding* BUMN, www.hukumonline.com

Menjawab isu- isu seputar terbitnya PP 72 Tahun 2016, www.jdih.BUMN.go.id

Nanda Narendra Putra, Tiga Persoalan Hukum di Balik Wacana *Holding* BUMN, www.hukumonline.com

No Name, Menguji Efektifitas terhadap Implementasi *Holding* BUMN Bidang Pertambangan www.kanalhukum.id

No Name, *Holding* BUMN Migas Berpotensi Inkonstitusional, www.reportaserakyat.com

No name, Menggugat Kontrol Negara dalam *Holding* BUMN Tambang, www.beritagar.id

No Name, Saham Dwiwarna Picu Persoalan Hukum *Holding* BUMNPertambangan, www.gatra.com

No Name, Persetujuan DPR dan Inbreng Saham BUMN dalam PP Nomor 72 Tahun 2016, www.jdih.go.id

Pebrianto Eko Wicaksono, PP *Holding* BUMN Migas Terbit, Pertamina Siapkan RUPS Caplok PGN, www.m.liputan6.com

Tri Jata Ayu Pramesti, Bisakah PP Dibentuk Tanpa ada Perintah UU, www.hukumonline.com diakses tanggal 20 Mei 2019

Trio Hamdani, Akhirnya *Holding* BUMN PerseroMigas Resmi Terbentuk, www.detikfinance.com

The Terms of *Golden share* , www.investopedia.com.

Ringkasan risalah RUPS Luar Biasa PGN tahun 2018 yang diselenggarakan 25 Januari 2018 diakses dari www.pgn.co.id

W Riawan Tjandra, Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN, www.bpk.go.id

Jurnal :

Atip Latipulhayat, *Golden Share and Privatisation of Strategic Sectors: A Comparative study between Indonesia and the UK*, International Journal of Public Law and Policy, Januari 2012, www.inderscience.com

EC Treaty, Chapter 4 Article 56- 60 dikutip dari Jurnal “The Legality of the Golden Share under EC Law”, Nadia Gaydarska & Stephan Rammeloo, Maastricht Faculty of Law Working Paper , Vol. 5, No. 9, 2009, www.ssrn.com

Nadia Gaydarska, *The Legality of The Golden Share under EC Law*, Maastricht Faculty of Law working Paper, Vol 5, No 9/2009

One share one vote : A European Rule, Guido Ferrarini, *ECGI - Law Working Paper No. 58/2006*

Stefan Grundmann, *Golden shares State Control in Privatised Companies: Comparative Law, European Law and Policy Aspects*, www.ssrn.com, diakses pada tanggal 26 Maret 2019

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6006)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertamina. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16)

Lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Tbk Sektor Non Perbankan

Skripsi

Dea Claudia, *Aspek Hukum Holding Company* dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara, Skripsi Universitas Indonesia, 2012.

Suminto Michellina, *Tanggung Gugat Super Holding BUMN* 2019, Skripsi Universitas Airlangga, 2017.